

KAPASITAS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DALAM MENINGKATKAN PROGRAM SISTEM KEUANGAN DESA BERBASIS APLIKASI

Shohibul Fauzan 1610511027 Drs. Itok Wicaksono, M.Si

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Prodi Ilmu Pemerintahan

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kapasitas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam Meningkatkan Program Sistem Keuangan Desa Berbasis Aplikasi di Desa Rambipuji Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif, Sumber Data yang diperoleh dari Bidang Keuangan dan Kekayaan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Pengumpulan Data melalui Wawancara, Observasi, serta Dokumentasi. Hasil dari pembahasan dalam penerapan Sistem Keuangan Desa ada beberapa Aspek diantaranya meliputi Proses, Sumber Daya Manusia, Strategi, dan Struktur Organisasi. Dalam penerapan Sistem Keuangan Desa di Kabupaten Jember itu terbilang lambat, tetapi di lihat dari segi Kapasitas kelembagaan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam meningkatkan Program Sistem Keuangan Desa sudah di kategorikan baik, karena sudah semua Desa di Kabupaten Jember menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa berbasis *Online* pada akhir tahun 2019.

Kata Kunci: Kapasitas, Siskeudes, Berbasis Aplikasi, Sumber Daya Manusia (SDM)

ABSTRACT

This study aims to determine the capacity of the Office of Community and Village Empowerment in Improving the Application-Based Village Financial System Program in the Village of Rambipuji, District of Rambipuji, Jember Regency. The method used in this study is a qualitative approach, Data Sources obtained from the Field of Finance and Wealth of the Village Community and Village Empowerment Office. Data Collection through Interviews, Observation, and Documentation. The results of the discussion in the application of the Village Financial System there are several aspects including the Process, Human Resources, Strategy, and Organizational Structure. In implementing the Village Financial System in Jember Regency, it is fairly slow, but in terms of institutional capacity in the Office of Community and Village Empowerment in improving the Village Financial System Program, it has been categorized as good, because all villages in Jember Regency have used the Village-based Online Financial System Application at the end of 2019.

Keywords: *Capacity: Siskeudes, Application Based, Human Resources (HR)*

I. PENDAHULUAN

Pertumbuhan dan perkembangan suatu Negara dipengaruhi oleh adanya teknologi yang semakin modern, dan memobilisasi semua aspek kehidupan baik aspek sosial, ekonomi dan budaya. Sistem pemerintahan merupakan cara pemerintah dalam mengatur atau mengurus segala yang berhubungan dengan pemerintah. Yaitu pemerintah pusat dan daerah, pemerintah

daerah dalam menjalankan tugasnya untuk menerapkan sampai ke desa, karena desa memiliki kultur yang berbeda pada saat menjalankan kegiatan pemerintahannya. Tujuan dana desa yaitu untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan pelayanan dalam pemerintahan desa, mengurangi kemiskinan untuk memajukan perekonomian desa sehingga bisa memperkuat masyarakat desa sebagai

subjek pembangunan. Di perlu tersedia untuk mengelola alokasi dana desa, tetapi untuk mendukung pengelolaan dan alokasi anggaran dana desa, kita memang membutuhkan sumber daya manusia yang optimal dan terampil dalam pengelolaan sistem melalui penggunaan media komputer, sehingga siskeudik sistem keuangan desa dibuat, yang merupakan aplikasi sederhana yang dikembangkan oleh Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, Siskeudes atau Sistem Keuangan Desa merupakan sebuah aplikasi untuk pembuatan anggaran, pembukuan, dan pelaporan keuangan desa,

Pemerintah kabupaten/kota dapat menggunakan Siskeudes Untuk semua desa, kumpulkan Laporan Desa (APBDes) atau Laporan Realisasi APBDes. Berdasarkan informasi dari BPKP, aplikasi ini dikembangkan untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa. Kekuatan pendorong dasar untuk pengelolaan sistem keuangan desa adalah UU Desa No.6 2014, Permendagri No.113 tahun2014. Tujuan dari pengembangan siskeudes adalah memudahkan pemerintah desa membuat anggaran, pembukuan, dan pelaporan keuangan. Aplikasi ini juga membantu pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan kompilasi, pengawasan, dan evaluasi RAPBDes. Setelah data dimasukkan, Siskeudes menghasilkan laporan yang diperlukan secara otomatis, menghemat waktu dan uang, potensi penipuan dan kesalahan manusia, dan terus mengumpulkan data. Selain itu, Siskeudes dapat melacak dan mencegah perubahan ilegal pada kegiatan atau anggaran. Namun masalah yang muncul belum sepenuhnya optimal menggunakan sistem keuangan desa karena masih banyak desa yang mengetahui tentang SIS dan belum menggunakan sistem tersebut. Aspek tata pemerintahan yang baik memungkinkan sistem tata pemerintahan desa, tata pemerintahan desa, di mana akuntabilitas, transparansi, partisipasi dan supremasi hukum merupakan elemen dalam menerapkan tata kelola yang baik. Tatakelola pemerintahan yang baik merupakan Salah satu tuntutan masyarakat

yang harus dipenuhi. Surat edaran kemendagri diperlukan untuk menginstruksikan semua provinsi dan kabupaten menerapkan siskeudes. Kabupaten harus membentuk gugus tugas untuk mengakomodasi pengaduan dan mengimplementasikan SES. Ada alokasi alokasi untuk pelatihan. Untuk meningkatkan kemampuan manajemen keuangan mereka, pemerintah pusat dan daerah harus memberikan pelatihan tambahan untuk karyawan kunci.

Dari pengembangan sistem keuangan desa yang di kembangkan oleh BPKP sudah di terapkan di berbagai daerah seluruh Indonesia salah satunya yaitu di Kabupaten Jember, Wakil Bupati Jember Drs. KH. A. Muqit Arief menegaskan tata kelola yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat tersebut harus menjadi perhatian semua pihak, khususnya pemangku kepentingan dalam Sistem Pemerintahan. "Tentunya harus menjadi perhatian khusus bagi segenap pemangku kepentingan, khususnya pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan tata kelola keuangan desa secara etis," kata Wabup dalam Workshop Hasil Evaluasi Implementasi Sistem Tata Kelola Keuangan Desa Dengan Aplikasi Siskeudes. Workshop digelar di Aula PB Soedirman Pemkab Jember, Selasa (08/5/2018), diikuti oleh kepala desa dan anggota badan permusyawaratan desa (BPD) se Kabupaten Jember. Pembicaranya diantaranya Anggota Komisi IX DPR RI M. Nur Purnamasidi, unsur BPKP, unsure BPK, dan Polda Jatim. Kepala desa dan anggota BPD, sebagai sumber daya manusia pengelola keuangan desa, memerlukan peningkatan kapasitas, kapabilitas, pengetahuan, dan wawasan secara berkelanjutan. Tata kelola keuangan diantaranya untuk penyusunan APB Desa serta laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh perangkat desa. Ini harus memenuhi standar, bila tidak tentu saja menjadi lahan yang rawan terjadinya manipulasi.

Ketidak sesuaian dengan standar tata kelola keuangan juga akan menjadi salah satu ukuran rendahnya perwujudan transparansi serta akuntabilitas rencana penggunaan dan pertanggungjawaban APB Desa. "Untuk

itu, aparaturnya sesuai per bidangnya nanti akan dibantu oleh tenaga pendamping profesional dalam melakukan penyusunan berbagai laporan pertanggungjawaban APB Desa,” ungkap Wabup. Menurut Wabup, tenaga pendamping dan kepala desa harus membina hubungan yang harmonis, agar kehadiran tenaga pendamping betul-betul memberikan dampak yang maksimal dalam rangka tata kelola keuangan desa. Di era saat ini, semua para aparaturnya harus bisa bekerja dan berpikir secara efisien dan efektif dengan memanfaatkan teknologi yang berbasis komputerisasi. Aplikasi Siskeudes ini merupakan sistem aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan dalam rangka meningkatkan tata kelola keuangan. Bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan aparaturnya desa tentang pengelolaan keuangan desa sesuai dengan undang-undang desa. Sehingga, nanti pengelolaan dana desa bisa efektif dan efisien, juga terselamatkan dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Dimana aplikasi sistem keuangan desa di Kabupaten Jember sudah di implementasikan di beberapa daerah contohnya di Kecamatan Rambipuji. Dalam pelaksanaan program pengembangan aplikasi SISKEUDES BKP menegaskan bahwa yang punya wewenang dalam program pengembangan aplikasi SISKEUDES adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, karena untuk mensukseskan program tersebut dari anggaran desa dan pengelolaan dana desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di tugaskan untuk melaksanakan program pembinaan dan bimbingan teknis, dalam program BIMBEK tersebut yang mengikuti diantaranya Desa Rambipuji, Desa Rowotamtu, Desa Curah Malang pada tahun 2018. Dalam program pengembangan aplikasi Sistem Keuangan Desa di Kab. Jember, peran dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sangatlah penting bagi aparaturnya desa terutama untuk pengelolaan keuangan desa. Karena sudah di tegaskan di PERBUP NO. 44 TAHUN 2016 dimana di susunan organisasi pasal 3 di sebutkan bahwa di bidang Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan ada seksi bagian Pengelolaan Keuangan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan latar belakang diatas untuk pengembangan aplikasi Sistem Keuangan Desa, berikut ini merupakan rumusan masalah mengenai bagaimana kapasitas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam meningkatkan program Sistem Keuangan Desa berbasis aplikasi di Kabupaten Jember?

Tujuan Masalah

Untuk mengetahui kapasitas pemberdayaan masyarakat dan desa dalam meningkatkan program sistem keuangan desa berbasis aplikasi di Kabupaten Jember.

II. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian deskriptif-kualitatif.

Dalam penelitian ini bertujuan ingin menggambarkan fenomena sosial tertentu. Hal ini fenomena yang ingin digambarkan adalah hal yang terkait Kapasitas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dalam Meningkatkan Program Sistem Keuangan Desa Berbasis Aplikasi di kabupaten jember.

Pendekatan yang digunakan dalam menggambarkan fenomena tersebut adalah studi di dinas terkait yang hanya berlaku untuk program tersebut, tidak berlaku untuk program lainnya.

Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi lokasi penelitian adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember, dimana program tersebut sudah berjalan pada tahun 2018 di Kecamatan Rambipuji.

Sumber Data

A. Data ini bersumber dari responden secara langsung. Dalam prakteknya diperoleh dari wawancara. Selain itu dari pengamatan langsung terhadap situasi lokasi penelitian.

Data primer diperoleh langsung dari 2 informan yang terdiri dari:

1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1 orang
2. Pemerintah Desa 1 orang

B. Data sekunder diperoleh dari sumber-sumber pendukung lokasi penelitian

yaitu dokumen-dokumen data statistik, buku-buku, majalah, koran dan keterangan lainnya. Data sekunder diperoleh dari sumber: dokumen dan arsip-arsip yang berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti.

Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu:

1. Wawancara
Teknik ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang mendalam mengenai persepsi, pendapat, kepercayaan, dan sikap dari para informan. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini merupakan petugas dari bidang Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan ada seksi bagian Pengelolaan Keuangan terkait dengan Program Sistem Keuangan Desa Berbasis aplikasi di Kabupaten Jember.
2. Observasi
Jenis observasi yang digunakan adalah observasi partisipan, yaitu pengamatan yang dilakukan dengan melibatkan diri secara langsung dalam proses kegiatan yang dilakukan oleh informan. Dalam hal ini pengamatan terhadap perilaku penerbitan perijinan serta perilaku Dinas dan Pemerintah Desa yang sedang mengurus izin lokasi.
3. Dokumentasi
Dokumentasi penelitian ini merupakan pengambilan gambar oleh peneliti untuk memperkuat hasil penelitian. Menurut Sugiyono (2013:240), dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.

Metode Penentuan Informan

Penelitian ini untuk menentukan informan menggunakan teknik purposive sampling yang dilakukan dengan pertimbangan tertentu, misalnya dengan pertimbangan memilih orang yang dianggap paling tahu (representatif) tentang apa yang kita harapkan atau mungkin dia

sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti dalam menjelajahi obyek sosial yang diteliti.

Metode Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis interaktif. Model ini ada 4 komponen analisis yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Siklus analisis interaktif ditunjukkan dalam bentuk skema berikut ini.

1. Pengumpulan data, yaitu mengumpulkan data di lokasi penelitian dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi.
2. Reduksi data, yaitu sebagai proses seleksi, pemfokusan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang ada di lapangan langsung, dan diteruskan pada waktu pengumpulan data.
3. Penyajian data, serangkaian organisasi informasi yang memungkinkan untuk operasi penelitian. Penyajian data diperoleh oleh berbagai jenis, jaringan, hubungan interaksi, atau tabel.
4. Menggambar kesimpulan, yaitu dalam pengumpulan data, peneliti perlu memahami dan menanggapi sesuatu yang telah diselidiki langsung di lapangan dengan mengatur pola arah dan sebab dan akibat.

Keabsahan Data

Triangulasi adalah cara yang paling umum digunakan untuk memastikan validitas data dalam penelitian kualitatif. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan data atau sebagai pembandingan terhadap data itu.

Berdasarkan pemaparan di atas penelitian ini menggunakan dua macam triangulasi, pertama triangulasi sumber data yang berupa observasi serta wawancara dengan narasumber secara langsung dan dokumen yang berisi catatan terkait dengan data yang ingin diperoleh penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kapasitas Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Dalam Meningkatkan Program Sistem Keuangan Desa Berbasis Aplikasi.

Program Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Kabupaten Jember berbasis aplikasi melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Jember, dimana pada akhir tahun 2017 SISKEUDES di kenalkan serentak di Bandung Permai, maka semua desa diharapkan segala administrasi menggunakan aplikasi yang berbasis Online, sehingga kedepan segala administrasi lebih tertata dengan baik. Hal tersebut berdasarkan dari surat dari KPK yang mana desa di Kabupaten jember wajib menggunakan Aplikasi Siskeudes dalam perencanaan, realisasi hingga pertanggung jawaban. Dalam meningkatkan Program tersebut DISPEMASDES melakukan pelatihan dan bimbingan teknis yang di laksanakan pada saat desa ada kesulitan dalam aplikasi tersebut.

Berdasarkan pembahasan di atas dalam program SISKEUDES dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa juga menyatakan bahwa :

Perencanaan. Perencanaan merupakan tahap perumusan program/kegiatan yang akan dilaksanakan pada desa yang bersangkutan. Pemerintah Desa harus menetapkan RAB (Rancangan Anggaran Biaya) , RAB adalah mengalokasikan biaya yang diperlukan untuk pembangunan desa, serta biaya lain yang berhubungan dengan proses keuangan. RAB dibuat oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Bidang Pengelolaan Keuangan yaitu Bapak Agung menyatakan bahwa :

“Dalam perencanan Program Sistem Keuangan Desa, Pemerintah desa melakukan perencanaan dalam rangka pembangunan desa yang sesuai dengan kewenangannya. Dimana perencanaan desa yang pertama RPJMDesa yang di lakukan 6 tahunan untuk 1 kali

jabatan Kepala Desa dan selanjutnya RKPDesa yang di lakukan 1 tahun dari penjabaran RPJMDesa. Itu saja untuk perencanaannya mas” (wawancara dengan bapak agung di bagian Pengelolaan Keuangan Desa, 02 Desember 2019, di Dipemasdes”).

Pelaksanaan. Pelaksanaan keuangan desa merupakan kegiatan dari proses perencanaan yang sudah ada dan kemudian pertahap-pertahap dilaksanakan dalam proses pembangunan desa. Untuk mencapai target pelaksanaan harus dilaksanakan dengan baik. Tahap implementasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa meliputi seluruh rangkaian kegiatan pelaksanaan. Dalam tahap ini semua yang menjadi dasar terjadinya proses pengadaan barang dan jasa, penyusunan buku kas dan lain-lain. Hal ini Bapak Agung Menyatakan Bahwa :

“ Pelaksanaan keuangan desa adalah kegiatan dari proses perencana, tahapan – tahapan untuk mencapai target pelaksanaan dengan tepat waktu “ (wawancara dengan bapak agung di bagian Pengelolaan Keuangan Desa, 02 Desember 2019, di Dipemasdes)”

Penatausahaan. Penatausahaan keuangan desa merupakan suatu kegiatan pada tahap ini proses penatausahaan dalam proses pembangunan desa dan laporan harus di lakukan dengan baik. Proses pencatatan transaksi yang terjadi dalam satu tahun anggaran, kegiatan penatausahaan mempunyai fungsi untuk menatausahaakan proses yang telah terjadi dari tahap pelaksanaan dan perencanaan APBDes. Hal ini sesuai dengan pernyataan oleh Bidang Keuangan yaitu Bapak Agung menyatakan Bahwa :

“ Dalam tahap ini seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan di kelompokan dan disusun dengan baik untuk di laporkan. Penatausahaan sendiri terdiri dari Kas Harian dan Jurnal”.

(wawancara dengan bapak agung di bagian Pengelolaan Keuangan Desa, 02 Desember 2019, di Dipemasdes)”.

Pelaporan. Pelaporan keuangan desa yang dimaksud adalah tahap terakhir dari bentuk pengelolaan keuangan desa.

“Setelah semua proses telah selesai akan disusun dalam bentuk laporan keuangan dan kemudian akan di laporkan kepada pihak yang bersangkutan. Pelaporan sendiri dari Laporan Keuangan, yang di laporkan dari Bendahara Desa, Laporan pertanggung jawaban APBDesa (tahunan), Laporan pelaksanaan APBDesa, Laporan realisasi kegiatan. (kasi/kaur) setiap kali selesai kegiatan” (wawancara dengan bapak agung di bagian Pengelolaan Keuangan Desa, 02 Desember 2019, di Dipemasdes)”.

Berdasarkan proses meningkatkan Program Sistem Keuangan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa harus mengukur kapasitas tersebut, Terkait dengan Kapasitas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam Meningkatkan Program Sistem Keuangan Desa Berbasis aplikasi di Kabupaten Jember jika ditinjau dari model Teori Kapasitas Milen2004 adalah sebagai berikut ini :

Proses

Dalam wawancara tentang proses dalam Program SISKEUDES menyatakan bahwa :

“Program Sistem Keuangan Desa di Kabupaten Jember di terapkan pada akhir tahun 2017. Maka dari itu proses dalam penerapan program Sistem Keuangan Desa di Kabupaten Jember bisa di pandang dari segi Perencanaan, Pelaksanaan, Pembinaan dan pelatihan, Bimbingan teknis, Pengawasan” (wawancara dengan Bu Ade di bagian Pengelolaan Keuangan Desa,


02 Desember 2019, di Dipemasdes)”.

Dalam wawancara tersebut Bu Ade mengungkapkan bahwa:

- Perencanaan yaitu pemilihan atau penetapan tujuan organisasi dan penentuan strategi, kebijakan, proyek, program, prosedur, metode, sistem, anggaran dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Maka dinas pemberdayaan masyarakat dan desa dalam melaksanakan program sistem keuangan desa dibutuhkan untuk merencanakan pembinaan dan bimtek di setiap desa.
- Pelaksanaan yaitu sebagai usaha-usaha yang dilakukan untukmelaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan denganmelengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimanatempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya. Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa juga dalam pelaksanaan program siskeudes harus mempersiapkan dalam semua rencana dan kebijakan yang di terapkan untuk program tersebut.
- Pembinaan dan pelatihan, dalam pembinaan program sistem keuangan desa itu harus mendatangkan dari pihak desa diantaranya bendahara desa, BPD, dan kaur lainnya, agar dalam penerapan program siskeudes tersebut bisa berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan dinas pembedayaan masyarakat dan desa di kabupaten jember.
- Bimbingan teknis, selain dari pembinaan juga dinas pemberdayaan dan desa harus menetapkan dan membuat kebijakan untuk melaksanakan bimbingan teknis, bimtek tersebut harus di laksanakan di setiap desa di kab jember.
- Pengawasan, dalam menerapkan dan melaksanakan program sistem keuangan desa, pengawasan


terhadap pelaksanaan tersebut, harus di awasi, agar dalam pengelolaan keuangan bisa transparan, efektif dan efisien. Dalam pengawasan sendiri, melibatkan dari KPK.

Berdasarkan jawaban dari Dinas tentang prosesnya Program Sistem Keuangan Desa, penelitian ini juga menfokuskan pada Desa Rambipuji. Dimana Desa Rambipuji Juga ikut Bimtek dalam Program Siskeudes tersebut. Bimbingan teknis di Kecamatan Rambipuji yang di hadiri semua Desa se Kecamatan Rambipuji Pada akhir Tahun 2017. Dari Bimtek Tersebut Bu Puput menyatakan bahwa :


“Dalam proses pengenalan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Kecamatan Rambipuji pada akhir 2017 dengan di adakan Bimbingan Teknis itu hanya sampai penganggaran saja mas.. sebenarnya di dalam aplikasi Siskeudes itu kan ada perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pembukuan dan pelaporan. Dari itu semua Dinas dan BPKP hanya Bimtek sampai penganggaran saja, selanjutnya dari penatausahaan sampai pelaporan itu di kerjakan secara manual di Desa” (Wawancara dengan Bu puput selaku Bendahara Desa Rambipuji, 20 Desember 2019, Desa Rambipuji)”.


Sumber Daya Manusia

Salah satu sumber daya yang mempengaruhi keberhasilan terhadap kapasitas suatu lembaga yakni sumber daya manusia. SDM ini dituntut untuk memiliki keahlian dan kemampuan dalam melaksanakan tugasnya sehingga tujuan yang diharapkan bisa tercapai. Dalam penerapan sistem keuangan desa, SDM sangatlah penting dalam melakukan kebijakan dari program tersebut. Sumber daya manusia tersebut mengetahui tentang tugas dan fungsinya sehingga bisa melakukan sebagaimana mestinya.

“Dalam rangka meningkatkan kapasitas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa untuk penerapan Sistem Keuangan Desa, Dispemasdes melaksanakan seperti Pelatihan Bimtek (bimbingan teknis). Dinas melakukan Bimtek bersama dengan desa yang dibawahhi oleh BPKP, Dari dinas untuk melakukan Bimtek yaitu bagian pengelolaan keuangan desa 2 orang, lalu dari desa itu adalah pendamping desa, yaitu kementerian PDTT (pembangunan desa tertinggal dan transmigrasi)” (wawancara dengan Bu Ade di bagian Pengelolaan Keuangan Desa, 02 Desember 2019, di Dipemasdes)”.


Selain Sumber Daya Manusia yang menjadi faktor penentu dalam keberhasilan atau kegagalan dalam sebuah pelaksanaan kebijakan, sumber daya anggaran juga menjadi faktor penentunya. Apabila sumber daya anggaran terbatas maka kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat juga menjadi terhambat. Selain dilihat dari sumber daya manusia dan sumber daya anggaran, faktor selanjutnya yakni sumber daya peralatan. Sumber daya peralatan ini juga menunjang terhadap pelaksanaan dari suatu kebijakan. Maka dari itu penelitian ini menfokuskan di Desa Rambipuji dalam Program Siskeudes di pandang dari sumber daya manusia sudah memenuhi kualitas dan kapasitas Desa dalam Bimtek di Kecamatan Rambipuji. Bu puput menyatakan bahwa :

“SDM dari Desa untuk menggunakan aplikasis Siskeudes sudah di bilang baik, karena disaat menghadiri Bimbimngan Teknis di Kecamatan Rambipuji yang menghadiri adalah Bendahara Desa, Operator Desa dan Kaur Umum” (Wawancara dengan Bu puput selaku Bendahara Desa Rambipuji, 20 Desember 2019, Desa Rambipuji)”.


Maka SDM dari Desa Rambipuji sudah ikut serta dalam Bimbingan Teknis di Kecamatan Rambipuji, dari itu semua kapasitas Desa tersebut bisa baik dalam menggunakan aplikasi Siskeudes yang terbaru yaitu Siskeudes 2.0

Strategi

Strategi dibedakan dengan taktik yang memiliki ruang lingkup yang lebih sempit dan waktu yang lebih singkat, walaupun pada umumnya orang sering kali mencampuradukan ke dua kata tersebut. Dari itu Dinas menyatakan dinas menyatakan bahwa :

“Strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam meningkatkan Sistem Keuangan Desa melakukan Bimbingan teknis (BIMTEK). Dispemasdes mendatangkan dari Pemerintah Desa yaitu Operator Desa dan Bendahara Desa, Mewajibkan APBDes menggunakan Sistem Keuangan Desa berbasis aplikasi, Kebijakan penganggaran untuk pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa melalui Anggaran Desa” (wawancara dengan Bu Ade di bagian Pengelolaan Keuangan Desa, 02 Desember 2019, di Dipemasdes)”.

Berdasarkan penjelasan dari Dinas terkait strategi DISPEMASDES dalam meningkatkan Sistem Keuangan Desa dengan melakukan Bimtek di berbagai Kecamatan, salah satu Desa yang di fokuskan di penelitian ini adalah Desa Rambipuji. Bu puput mengungkapkan bahwa :

“Untuk strategi yang di lakukan Dinas dalam Program Siskeudes sendiri adalah melakukan Bimbingan Teknis di Kecamatan mas... tetapi dalam Bimtek tersebut Dinas hanya melakukan Bimtek sampai dengan penganggaran saja mas.. jadi untuk penatausahaan sampai pembukuan dan pelaporan tidak di sampaikan, malah di suruh mengisi manual di desa. Ya

menurut saya untuk menilai strategi dinas kurang memfasilitasi dari segi penggunaan aplikasinya, karena tidak di kenalkan semua yang ada di dalam aplikasi tersebut seperti penatausahaan sampai pembukuan dan pelaporan” (Wawancara dengan Bu puput selaku Bendahara Desa Rambipuji, 20 Desember 2019, Desa Rambipuji)”.

Program Siskeudes juga kurang maksimal dari segi Bimteknya dari itu semua dampaknya adalah keterlambatan pengiriman atau upload dari Desa ke Kecamatan dan dari Kecamatan langsung ke Dinas. Salah satu keterlambatannya di Desa Rambipuji yang sudah memasukan anggaran Desa atau APBDesa di dalam aplikasi Siskeudes, sehingga dapat memperlambat pengiriman ke Dinas ujar Pak Agung selaku bidang Pengelolaan Keuangan Desa.

Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam penerapan Sistem Keuangan Desa adalah di bidang Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan sudah di sebutkan sama Bu Ade bahwa :

“Bidang Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan Pembinaan pengelolaan Keuangan dan Kekayaan desa, menghimpun, mengolah dan merumuskan pedoman/petunjuk teknis tentang pengelolaan Keuangan dan Kekayaan desa serta Bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa, menginventarisasi aset dan kekayaan desa, memfasilitasi pencairan bantuan keuangan kepada pemerintahan desa, melaksanakan pembinaan dan pelatihan pengelolaan keuangan desa bagi pemerintah desa, melaksanakan pengembangan BUMDesa dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas” (wawancara dengan Bu Ade

di bagian Pengelolaan Keuangan Desa, 02 Desember 2019, di Dipemasdes)”.
Seksi pada bidang sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan.

Berdasarkan penjelasan Struktur Organisasi Dinas maka penelitian ini juga fokus di Desa, dalam penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa Bu Puput Menyatakan Bahwa :

“Struktur Organisasi Desa Rambipuji dalam penggunaan aplikasi Siskeudes yaitu Bendahara Desa dengan Operator Desa. Sistem Keuangan Desa di operasikan dari Dinas ke Kecamatan Rambipuji untuk Pelatihan atau Bimbingan Teknik, sehingga Bendahara Desa dengan Operator Desa yang bertugas untuk Bimbingan Teknik dalam Penerapan Aplikasi tersebut” (Wawancara dengan Bu puput selaku Bendahara Desa Rambipuji, 20 Desember 2019, Desa Rambipuji)”.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat di simpulkan bahwa kapasitas kelembagaan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam meningkatkan Program Sistem Keuangan Desa sudah di kategorikan baik. Karena di lihat dari segi konseptual teori Capacity Building terdiri dari :

1. **Proses** : dari segi prosesnya sudah di katakana baik. Karena dalam meningkatkan Program Sistem Keuangan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Menyusun seperti :Perencanaan, Pelaksanaan, Pembinaan dan pelatihan, Bimbingan teknis, Pengawasan.
2. **Sumber Daya Manusia** : Salah satu sumber daya yang mempengaruhi keberhasilan terhadap kapasitas suatu

lembaga yakni sumber daya manusia. SDM ini dituntut untuk memiliki keahlian dan kemampuan dalam melaksanakan tugasnya sehingga tujuan yang diharapkan bisa tercapai. Dalam rangka meningkatkan kapasitas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa untuk penerapan Sistem Keuangan Desa, Dispemasdes melaksanakan seperti : Pelatihan Bimtek (bimbingan teknis). Dinas melakukan Bimtek bersama dengan desa yang dibawah oleh BPKP, Dari dinas untuk melakukan Bimtek yaitu bagian pengelolaan keuangan desa 2 orang, lalu dari desa itu adalah pendamping desa, yaitu kementrian PDTT (pembangunan desa tertinggal dan transmigrasi)

3. **Strategi** : Dalam meningkatkan Program Sistem Keuangan Desa sudah di katakana baik. karena setrategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam penerapan Sistem Keuangan Desa antara lain : Bimbingan teknis (BIMTEK). Dispemasdes mendatangkan dari Pemerintah Desa yaitu Operator Desa dan Bendahara Desa, Mewajibkan APBDes menggunakan Sistem Keuangan Desa berbasis aplikasi, Kebijakan penganggaran untuk pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa melalui Anggaran Desa

4. **Struktur Oraginasi** : Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam penerapan Sistem Keuangan Desa adalah di bidang Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan.

Saran

Saran peneliti kepada pemerintah terutama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember untuk lebih ditingkatkan lagi dalam penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa. Karena di Desa Rambipuji untuk Bimtek penggunaan Aplikasi SISKEUDES 2,0 itu hanya sampai Penatausahaan. Maka untuk mengembangkan suatu sistem (SISKEUDES) harus mengukur Kapasitas Sumber Daya Manusia,

DAFTAR PUSTAKA

- Anni Milen. 2004. Pegangan Dasar Pengembangan Kapasitas. Diterjemahkan secara bebas. Yogyakarta: Pondok Pustaka Jogja.
- Arikunto, 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Eko febrilusiono melakan, *analisis penerimaan aplikasi siskeudes di lingkungan pemerintah daerah kabupaten sambas, jurnal akuntansi, ekonomi dan manajemen bisnis vol. 5, no. 2, december 2017, 163-172.*
- Gayatri, efektivitas penerapan siskeudes dan kualitas laporan keuangan dana desa, fakultas ekonomi dan bisnis universitas udayana, bali, indonesia.
- Grindle, Merilee S. 2009. *Going Local: Decentralization, Democratization and the promise Good Governance*. New Jersey: Preston University.
- Hamidi. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: UMM Pres.
- Lubis, dan husin. (1987). *Teori Organisasi suatu pendekatan Makro*. Jakarta: Pusat Antar Universitas Ilmu-Ilmu Sosial.
- Morrison, Tarance. 2001. *Actionable Learning – A Handbook for Capacity Building Through Case*. ADB Institute.
- Miles dan Huberman. 1992. *Analisis data Kualitatif. (diterjemahkan Ole: Tjetjep Rohedi Rosidi)*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Nawawi, Hadari dan M. Martini Hadari. 1992. *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- J. Moleong, Lexy. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif. Remaja Rosdakarya*; Bandung. 167 hlm.
- Malahika, m, jehan, *penerapan sistem keuangan desa (siskeudes)* *Jurnal riset akuntansi going concern* 13(4), 2018, 578-583.